



EVALUASI RENJA 2021

DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA
KOTAMAKASSAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 telah kami selesaikan tepat waktu.

Laporan Evaluasi RENJA SKPD ini, merupakan gambaran capaian kinerja program dan kegiatan serta capaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja program untuk Tahun Anggaran 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 79% dengan kategori Tinggi dari 5 (lima) program yang diturunkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 43.216.069.154.- dari alokasi anggaran dalam APBD Kota Makassar tahun anggaran 2021.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Makassar, 14 Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kota Makassar**



Mahyuddin, S.STP., M.A.P.
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip.19781224 1997111 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Metode	5
1.5 Program	5
1.6 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	6
BAB II PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2021 DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021	13
BAB III CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2020	18
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI	25
Bab V PENUTUP	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Rekomendasi.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai capaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai bagian integral Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021, dan untuk menjamin kesinambungan rencana program/kegiatan tahunan, diperlukan evaluasi hasil Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 303 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021 mencakup rencana program dan kegiatan. Evaluasi hasil RENJA SKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala SKPD dalam mendukung proses pelaksanaan evaluasi hasil RKPDP Tahun berjalan serta menggunakan penilaian untuk mengetahui realisasi antara program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan evaluasi rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

- a. Pencapaian target-target rencana program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renja Tahun 2021;
- b. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPA Dinas Informatika Tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan evaluasi rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah :

- a. Memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan IV sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 berdasarkan realisasi anggaran;
- b. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika hingga triwulan IV sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021;
- c. Menjadikan hasil evaluasi Renja ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.4. Metode

Metode evaluasi menggunakan pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam DPA. Evaluasi indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Renja SKPD. Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan. Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja (Tahunan) Permendagri 86/2017	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Triwulan III)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	≤ 50%	Sangat Rendah

1.5. Program

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah menetapkan 5 (lima) program yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program informasi dan komunikasi publik;
3. Program aplikasi informatika;
4. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

1.6. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Adapun indikator kinerja dari Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah ditetapkan indikator kerjanya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tabel Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	65%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Renja Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen
		Tersedianya Dokumen Renja SKPD yang disusun	1 Dokumen
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen
		Tersedianya Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	1 Dokumen

1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen
		Tersedianya rencana kerja SKPD yang dikendalikan dan dievaluasi	1 Dokumen
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	100%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai menerima gaji / tunjangan	12 Bulan
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelolaan keuangan SKPD	7 Orang
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD yang tersusun	2 Dokumen
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	100%
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	145 Pasang
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang

1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	90%
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat studio yang diadakan	0 Unit
		Jumlah komputer yang diadakan	3 Jenis
		Jumlah alat kantor yang diadakan	6 Jenis
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	11 Unit
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia	25 Jenis
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia	7 Jenis
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 Jenis
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	62 Kali
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	90%
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	1000 Surat
		Terhubungnya jasa pengiriman surat	12 Bulan

1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa listrik, telepon, dan air yang tersedia	3 Jenis
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	4 Jenis
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi yang tersedia	15 Unit
		Jumlah alat angkut darat bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	16 Unit
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja kerja/rapat yang mendapat pemeliharaan	20 Unit
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung tempat kerja yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	1 Jenis
1.6.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah komputer yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	4 Jenis
		Jumlah alat kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	7 Jenis

		Jumlah alat rumah tangga yang mendapat perawatan rutin/berkala	40 Unit
		Jumlah alat studio yang mendapat perawatan rutin/berkala	1 Jenis
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota makassar	100%
2.1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan pantauan aspirasi publik	6 Kebijakan
2.1.2	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah data yang terupload	12 Data
2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang disebarkan kepada masyarakat	12 Bulan
2.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media yang menjalin kerja sama	4800 Eksemplar
2.1.5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah komunitas sumber daya kehumasan yang dikoordinasikan	38 Paket
2.1.6	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik		12 Bulan
3	Program Aplikasi Informatika		
3.1	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase layanan publik yang disenggalarkan	100%

		secara online dan terintegrasi	
3.1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen tata kelola IT	4 dokumen
3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Tercapainya optimalisasi layanan OP	90%
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik		%
3.1.4	Sub Kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		Aplikasi
3.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah		Regulasi
3.1.6	Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas		%
3.1.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah		%
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral		
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Tersedianya data dalam bentuk profil kota makassar	1 Dokumen
4.1.2	Sub Kegiatan Membangun Meta Data Sektoral	Tersedianya portl meta data statistik sektoral	1 Portal

5	Program Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level I
5.1.1	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota;	Jumlah dokumen keamanan informasi	1 Dokumen
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah layanan keamanan informasi	3 Layanan

BAB II
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2021
DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021 memuat 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 43.216.069.154,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendukung
 - a. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Utama
 - a. Program informasi dan komunikasi public
 - b. Program Aplikasi Informatika
 - c. Program penyelenggaraan statistik sectoral
 - d. Program Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Dalam penyusunan Renstra untuk mendukung visi misi kepala daerah ada

penambahan kegiatan dari 10 (sepuluh) menjadi 12 (dua belas). Berikut perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2021 dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Tabel 2.1 Tabel perbandingan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja 2021 dengan Renstra 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2021	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 2021
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.6.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2.1.1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.1.2	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2.1.2	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	2.1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.1.5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	2.1.5	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
2.1.6	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	2.1.6	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
		2.1.7	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
		2.1.8	Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis
		2.1.9	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
		2.1.10	Sub Kegiatan penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah
		2.1.11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3	Program Aplikasi Informatika	3	Program Aplikasi Informatika
3.1	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	3.1	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
3.1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik	3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik
3.1.4	Sub Kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	3.1.4	Sub Kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
3.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	3.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah
3.1.6	Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	3.1.6	Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas
3.1.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	3.1.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral	4	Program penyelenggaraan statistik sektoral

4.1	Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	4.1	Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
4.1.2	Sub Kegiatan Membangun Meta Data Sektoral	4.1.2	Sub Kegiatan Membangun Meta Data Sektoral
5	Program Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	5	Program Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	5.1	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
5.1.1	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota;	5.1.1	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota;
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		5.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota
		5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
		5.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2020

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 7.885.998.979,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 7.103.563.866,- (90%). Indikator programnya adalah presentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah. Rata-rata capaian kinerja 80% dengan predikat kinerja tinggi. Adapun sub kegiatannya meliputi:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Pagu anggaran Rp. 31.519.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 31.519.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Pagu anggaran Rp. 8.351.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV Rp. 8.351.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, Jumlah Koordinasi Pagu anggaran adalah Rp.10.761.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV Rp. 10.761.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- d. Kooordinasi Penyusunan DPA-SKPD,. Pagu anggaran Rp. 9.941.000,-dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 9.941.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- e. Kooordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Kooordinasi Penyusunan DPA-SKPD. Pagu anggaran Rp. 9.691.000,-dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IVsebesar Rp. 8.791.000,- (91)%. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.

- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan Pagu anggaran Rp 43.691.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 41.991.000,- (96%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan 100%.
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Pagu anggaran Rp 11.134.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 9.754.000,- (88%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
- h. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan. Pagu anggaran Rp. 5.721.630.654,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 5.425.044.865,- (95%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- i. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Pagu anggaran Rp. 335.530.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 301.77.000,- (90%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- j. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, indikator outputnya adalah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD. Pagu anggaran Rp. 95.800.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 95.550.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- k. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, indikator kegiatannya adalah Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Pagu anggaran Rp. 87.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 83.720.000,- (96%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 97%.
- l. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, indikator kegiatannya adalah Jumlah Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Pagu anggaran Rp. 17.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 7.500.000,- (44%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 17%.

- m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran Rp. 139.281.250,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 82.327.000,- (51%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 58%.
- n. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pagu anggaran Rp. 4.688.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0(0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
- o. Penyediaan bahan logistik kantor Kantor. Pagu anggaran Rp. 185.998.515,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 140.287.000,- (75%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 80%.
- p. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Pagu anggaran Rp. 55.671.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 21.709.000,- (39%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 57%
- q. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Pagu anggaran Rp. 17.560.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 17.220.000,- (98%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- r. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pagu anggaran Rp. 44.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 41.879.956,- (95%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 6%
- s. Penyediaan jasa surat menyurat. Pagu anggaran Rp. 355.050.600,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 319.226.028,- (90%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 117%
- t. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pagu anggaran Rp. 268.716.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 109.693.968,- (41%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- u. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran Rp. 33.151.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 20.496.000,- (88%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%

- v. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu anggaran Rp. 17.375.400,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 16.035.600,- (92%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
 - w. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pagu anggaran Rp. 265.728.560,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 239.258.449,- (89%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 80%
 - x. Pemeliharaan Mebel Pagu anggaran Rp. 4.960.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 4.080.000,- (82%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
 - y. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya Pagu anggaran Rp. 6.270.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 5.890.000,- (94%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
 - z. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran Rp. 79.550.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 42.145.000,- (53%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 51%
2. Program informasi dan komunikasi publik
- Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp..3. 399.177.000,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.075.008.068,- (90%) Indikator programnya adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota makassar. Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Adapun sub kegiatannya meliputi:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Penyediaan Kebijakan Teknis Informasi. Pagu anggaran Rp. 227.660.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 225.460.000,- (99%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.

- b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Jumlah kegiatan pantauan aspirasi publik. Pagu anggaran Rp. 148.576.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 145.688.000,- (98%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
 - c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Data yang terupload. Pagu anggaran Rp. 276.556.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 274.435.000,- (99%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
 - d. Pelayanan Informasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Informasi Yang disebarakan Kepada Masyarakat. Pagu anggaran Rp. 1.092.264.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 1.042.864.000,- (95%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
 - e. Layanan Hubungan Media, indikator output kegiatannya adalah Jumlah media yang menjalin kerja sama . Pagu anggaran Rp 1.440.803.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 1.200.803.000,- (83%) . Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
 - f. Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik, indikator kegiatannya adalah Jumlah Komunitas Sumber daya kehumasan yang dikoordinasikan. Pagu anggaran Rp. 213.318.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 185.758.064,- (87%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
3. Program aplikasi informatika
- Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 31.297.802.500,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 25.180.316.552,- (80%), indikator kegiatannya adalah Persentase layanan publik yang disenggalarkan secara online dan terintegrasi Rata-rata capaian kinerja 65% dengan predikat kinerja Sedang. Adapun sub kegiatannya meliputi :
- a. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, indikator output kegiatannya adalah Jumlah dokumen tata kelola IT. Pagu anggaran Rp. 38.037.500,- dengan proporsi realisasi

- anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp.0,- (0%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
- b. Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah indikator output kegiatannya adalah Tercapainya optimalisasi layanan OP Pagu anggaran Rp. 13.635.692.500,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 12.771.716.484,- (94%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 111%.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik indikator output kegiatannya adalah Integrasi data yang terverifikasi Pagu anggaran Rp. 633.984.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 278.157.568,- (44%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 40%
 - d. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik indikator output kegiatannya adalah Aplikasi yang terpublikasi Pagu anggaran Rp. 18.378.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0,- (0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
 - e. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah indikator output kegiatannya adalah Pembuatan regulasi yang diakomodasi Pagu anggaran Rp. 124.725.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0,- (0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
 - f. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas Pagu anggaran Rp. 64.275.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0 (0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
 - g. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Pagu anggaran Rp. 16.782.710.500,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 12.130.442.500,- (72%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
4. Program penyelenggaraan statistik sektoral
- Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 464.986.300,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 442.777.540,- (95%), indikator kegiatannya adalah

persentase data pembangunan daerah yang tepat waktu Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja rendah. Adapun sub kegiatannya meliputi

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Pagu anggaran Rp. 306.137.400,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 304.772.176,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- b. Membangun metadata statistik sektoral Pagu anggaran Rp. 158.848.900,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 138.005.364,- (87%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%

5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 168.104.375,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 160.912.686,- (96%), indikator kegiatannya adalah persentase data pembangunan daerah yang tepat waktu Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja rendah. Adapun sub kegiatannya meliputi:

- a. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota Pagu anggaran Rp. 8.349.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp.8.275.000,- (99%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- b. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik Pagu anggaran Rp. 159.755.375,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 152.637.686,- (96%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021 terdapat faktor pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Faktor Pendorong
 - 1) Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam menjalankan program.
 - 2) Jumlah SDM tenaga kontrak cukup memadai.
 - 3) Dukungan peralatan kerja cukup memadai
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Beberapa belanja modal tidak dilaksanakan karena spesifikasi yang diinginkan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ada.
 - 2) Jabatan definitif untuk Kasubag Perencanaan dan Pelaporan sampai sekarang belum ada.
 - 3) Kompetensi SDM yang ada kurang mendukung untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 - 4) Dalam pengisian indikator kinerja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan ada yang tidak dilakukan sehingga menyulitkan dalam mengukur capaian kinerja
 - c. Tindak Lanjut
 - 1) Melakukan perencanaan belanja modal yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan
 - 2) Menetapkan pejabat Pelaksana Tugas Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan sampai menunggu pelantikan pejabat defenitif.
 - 3) Melakukan penempatan staf sesuai dengan keahlian dan latar belakang Pendidikan
 - 4) Memperhatikan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada apenyusunan anggaran selanjutnya, sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja.

2. Program informasi dan komunikasi publik
 - a. Faktor Pendorong
 - 1) Jumlah tenaga kontrak cukup memadai
 - 2) Adanya dukungan dan perhatian pimpinan terkait program Informasi Komunikasi Publik
 - 3) Kerjasama dan koordinasi antara staf dan pimpinan cukup baik
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Jumlah anggaran yang tidak memadai, khususnya anggaran media.
 - 2) Jabatan definitif untuk kepala Seksi Komunikasi Sosial kosong.
 - 3) Kompetensi pengelola website kurang mendukung.
 - 4) Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) belum berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Tindak Lanjut
 - 1) Untuk Rencana Kerja di Tahun 2022 anggran media sudah ditingkatkan
 - 2) Menetapkan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Komunikasi Sosial sampai menunggu pelantikan pejabat defenitif.
 - 3) Mencari atau menetapkan kedepannya tenaga ahli di bidang pengembangan website.
 - 4) Membuat Surat Keputusan Pengelola PPID Utama dan Pembantu sehingga kegiatan pengelolaan Informasi Daerah dapat berjalan.
3. Program Aplikasi dan Informatika
 - a. Faktor Pendorong
 - 1) SDM yang berlatar belakan IT cukup Memadai
 - 2) Dukungan sumber anggran yang memadai
 - 3) Program Aplikasi dan Informatika menjadi program prioritas Kepala Daerah.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Adanya gagal tender untuk pengadaan CCTV Surveillance dikarenakan pemenang lelang mundur dari pekerjaan.
 - 2) Barang belanja modal yang diinginkan dipesan dari luar negeri serta waktu pengerjaan yang sempit.
 - 3) Jabatan defenitif untuk kepala Seksi Standarisasi Monitoring dan Evaluasi kosong.

- c. Tindak Lanjut
 - 1) Melakukan kegiatan Tender lebih awal di tahun anggaran 2022
 - 2) Menetapkan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sampai menunggu pelantikan pejabat definitif.
 - 3) Menyusun anggaran belanja modal dengan memperhatikan spesifikasi barang yang dibutuhkan.
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Faktor Pendorong
 - 1) Sudah ada SDM berlatar belakang statistik yang ditempatkan di Bidang Pengelola Data Elektronik.
 - 2) Penggunaan sistem SIPD cukup memudahkan dalam melakukan penganggaran meskipun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian baru.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Akibat Pandemi Covid 19 hampir semua kegiatan mengalami perlambatan dalam pencapaian target yang ditentukan
 - 2) Jabatan definitif untuk kepala Seksi Kompilasi dan Integrasi Data serta Kepala Seksi Statistik masih kosong.
 - c. Tindak Lanjut
 - 1) Melakukan penyusunan alur kas berdasarkan prioritas program yang akan dilaksanakan lebih dulu.
 - 2) Menetapkan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kompilasi dan Integrasi Data serta Kepala Seksi Statistik sampai menunggu pelantikan pejabat definitif
- 5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - a. Faktor Pendorong
 - 1) Untuk staf yang memiliki kualifikasi ahli sandi sudah mempunyai 4 orang.
 - 2) Adanya dukungan koordinasi dengan Bidang Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
 - 3) Adanya kekompakan dalam hal berkegiatan di Bidang Persandian.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Tidak ada staf berlatar belakang IT yang ditempatkan di Bidang Persandian

- 2) Dukungan anggaran yang kurang memadai dalam melaksanakan kegiatan keamanan informasi
- c. Tindak Lanjut
- 1) Mengusulkan formasi CPNS atau staf ahli terkait keamanan informasi untuk ditempatkan di Bidang Persandian.
 - 2) Melakukan pengusulan anggaran yang memadai untuk Rencana Kerja Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Rencana Kerja yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk tahun 2021 adalah 83 % kategori Tinggi yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Dari 5 (lima) program yang diturunkan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh kegiatan) dan telah mencapai kinerja yang diharapkan.

Realisasi anggaran dari DPA sebesar Rp. 43.216.069.154,- adalah sebesar Rp. 35.962.578.708,- atau sebesar 83% Dengan kategori tinggi. Untuk mewujudkan target pencapaian yang di tetapkan di Renja maka diperlukan komitmen, strategi dan kerja keras segenap komponen yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5.2 Rekomendasi

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja di tahun anggaran 2022 ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penentuan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan agar memperhatikan output yang akan di capai sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian indikator kinerja.
2. Dalam Menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperhatikan tujuan dan sasaran skpd yang tercantum di Renstra SKPD.
3. Menyusun rencana aksi sebagai alat kontrol capaian kinerja SKPD

NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2021-2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD / RENJA SKPD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG G 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	Ket				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. DPA	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)										
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media		Jumlah media yang menjalin kerja sama	Paket					38	950,803,000	1,440,803,000	0		10	250,000,000	5	75,000,000	23	875,803,000	38	1,200,803,000	100%	83%						
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik		Jumlah komunitas sumber daya kehumasan yang dikoordinasikan	Bulan					12	478,518,000	213,318,000	3	38,083,456	3	47,510,344	3	48,222,132	3	51,942,132	12	185,758,064	100%	87%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100%	94%									
Predikat Kinerja																			R	R									
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									13,344,974,300	31,297,802,500			335,323,760	2,210,852,872		3,229,372,292		19,404,767,628		25,180,316,552								
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%					100	13,344,974,300	31,297,802,500	10	335,323,760	22	2,210,852,872	33	3,229,372,292	30	19,404,767,628	95	25,180,316,552	95%	80%						
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen tata kelola IT	dokumen					4	38,037,500	38,037,500	0		0		0		0		0		0%	0%						
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah		Tercapainya optimalisasi layanan OP	%					90	2,619,574,800	13,635,692,500	15	316,282,032	20	485,621,016	25	688,388,100	40	11,281,425,336	100	12,771,716,484	111%	94%						
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik			%					100	633,984,000	633,984,000	5	19,041,728	10	20,537,056	5	19,789,392	20	218,789,392	40	278,157,568	40%	44%						
2.16.03.2.02.07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik			Aplikasi					2	18,378,000	18,378,000	0		0		0		0		0		0%	0%						
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah			Regulasi					1	124,725,000	124,725,000	0		0		0		0		0		0%	0%						
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas			%					50	64,275,000	64,275,000	0		0		0		0		0		0%	0%						
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah			%					100	9,846,000,000	16,782,710,500	25		25	1,704,694,800	25	2,521,194,800	25	7,904,552,900	100	12,130,442,500	100%	72%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			36%	30%									
Predikat Kinerja																			R	R									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									464,328,300	464,986,300			27,781,296	78,046,764		174,236,740		162,712,740		442,777,540								
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	%					100	464,328,300	464,986,300	10	27,781,296	20	78,046,764	50	174,236,740	30	162,712,740	100	442,777,540	100%	95%						
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		Tersedianya data dalam bentuk profil kota makassar	Dokumen					1	306,137,400	306,137,400	0	14,281,296	0	47,759,792	1	104,742,044	0	137,989,044	1	304,772,176	100%	100%						
2.20.02.2.01.03	Membangun metadata statistik sektoral		Tersedianya portil meta data statistik sektoral	Portal					1	158,190,900	158,848,900	0	13,500,000	0	30,286,972	1	69,494,696	0	24,723,696	1	138,005,364	100%	87%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100%	93%									
Predikat Kinerja																			R	R									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									117,817,200	168,104,375			14,281,296	22,560,292		18,955,044		105,116,054		160,912,686								
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	level					1	117,817,200	168,104,375	1	14,281,296	1	22,560,292	1	18,955,044	1	105,116,054	1	160,912,686	100%	96%						
2.21.02.2.01.01	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen keamanan informasi	dokumen					1	8,349,000	8,349,000	0		0	3,379,000	1		0	4,896,000	1	8,275,000	100%	99%						
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik		Jumlah layanan keamanan informasi	layanan					3	109,468,200	159,755,375	0	14,281,296	1	19,181,292	1	18,955,044	1	100,220,054	3	152,637,686	100%	96%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100%	97%									
Predikat Kinerja																			R	R									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			83%	79%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			R	R									



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
Mahyuddin, S.STP. M.A.P.
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip. 19781224 199711 1 001